

INTISARI

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Kampung Lalang □ sebuah dusun kecil yang dihuni para pengungsi korban konflik antara GAM dan RI yang memuncak tahun 1998-2003, di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh □ telah dua kali menjadi sasaran program pembangunan pasca konflik yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi, yaitu pada program penanaman cabai tahun 2005 dan program pembangunan kebun kelapa sawit tahun 2008. Program-program tersebut memiliki tujuan untuk membangun kembali perekonomian masyarakat setelah porak-poranda akibat konflik bersenjata.

Dalam tulisan ini, saya mencoba melihat proses serta dampak dari hadirnya program-program pembangunan pasca konflik di Kampung Lalang. Melalui program-program tersebut, tidak hanya harapan-harapan baru akan kemajuan yang tumbuh, tetapi juga masalah-masalah baru bagi perekonomian masyarakat.

Program-program pembangunan pasca Konflik di Kampung Lalang yang mengusung komoditas tunggal dengan nilai jual tinggi di pasar memicu terjadinya perubahan komoditas yang ditanam para petani. Para petani Kampung Lalang baik yang terlibat dalam program-program tersebut ataupun yang tidak, tidak dengan sukarela dan mau tidak mau menanam komoditas yang digalakkan pemerintah, atau paling tidak memiliki nilai jual setara di pasaran agar tidak terlempar dari persaingan memperebutkan posisi dalam relasi kapital.

Selain itu, pemerintah pada awalnya memberikan akses atas lahan sebagai sumberdaya produksi kepada seluruh petani Kampung Lalang, baik yang tidak memiliki ataupun memiliki lahan. Namun, perencanaan dan pelaksanaan program yang sarat akan penyederhanaan sempit berujung pada gagalnya program-program tersebut, dan membuat para petani menjual lahan mereka. Hal ini kemudian memunculkan ketimpangan akses di kalangan petani Kampung Lalang atas lahan sebagai sumberdaya produksi. Ketimpangan akses inilah yang kemudian semakin mengukuhkan pelapisan sosial di Kampung Lalang di mana para pemilik modal bertengger pada puncak pelapisan tersebut.

Kata kunci: Pembangunan pasca konflik, perubahan, komoditas, lahan

ABSTRACT

In the period of the last decade, Kampung Lalang □ a small hamlet occupied by refugees of the conflict between GAM and RI which culminated in 1998-2003, in Pintu Rime Gayo Subdistrict, Bener Meriah District, Aceh Province □ has twice been subjected to post-conflict development program implemented by the provincial government, namely the chili planting program in 2005 and palm oil development program in 2008. These programs aimed to rebuild the economy after torn apart by the armed conflict.

In this writing, I try to see the process and the impact given by the presence of post-conflict development programs in Kampung Lalang. Through post-conflict development programs, not only new expectations to move forward that arise, but also new problems for the economy.

Post-conflict development programs in Kampung Lalang that carries a single high valued commodity in the market leads to changes in commodity planted by farmers. Kampung Lalang farmers, both involved in those programs or otherwise, forced, and unavoidably plant commodities government encouraged, or at least have equal value on the market, in order to not being knocked out of the competition for positions in the capital relation.

In addition, the government initially provide access to land as a resource of production to all farmers in Kampung Lalang, both of which who don't own or own land. However, the planning and the execution of the programs that loaded by simplifications, lead to the failure of those programs, and made farmers sell their land. This then led to unequal access among Kampung Lalang farmers on the land as a production resource. Inequality of access was then reinforced the social stratification in Kampung Lalang, where the owners of capital perched on the peak of that stratification.

Key words: Post-conflict development, change, commodity, land